

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-
2021)**



SKRIPSI

Oleh:

Nama: Haninaturrahmah Rosadi

No. Mahasiswa: 20312316

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL DAN UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2017-2021)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Starata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama: Haninaturrahmah Rosadi

No. Mahasiswa: 20312316

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Penulis,



Haninaturrahmah Rosadi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL DAN
UKURAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara
Barat Tahun 2017-2021)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama: Haninaturrahmah Rosadi

No. Mahasiswa: 20312316

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 18 Desember 2023

Dosen Pembimbing,



(Ahada Nur Fauziya, SE., Ak., M.Ak.)

BERITA ACARA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Disusun oleh : HANINATURRAHMAH ROSADI

Nomor Mahasiswa : 20312316

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Selasa, 09 Januari 2024

Penguji/Pembimbing Skripsi : Ahada Nur Fauziya, SE., Ak., M.Ak.

Penguji : Rizki Hamdani, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.St., Ph.D., CFA, CertIPSAS.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alaamiin, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”** guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya *support* dan bantuan dari berbagai pihak, maka penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dedy Rosadi dan Ibu Nurwahidah kedua orang tua penulis yang selalu memotivasi, membimbing serta do'a yang selalu mengalir untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas perjuangan dan selalu setia mendengar keluh kesah penulis. Semoga Mama dan Bapak sehat selalu.
3. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Bisnis Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Prof. Rifqi Muhammad, S.E., S.H., M.Sc., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
6. Ibu Ahada Nurfauziya, S.E., M.Ak., Ak. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang berkenan membantu dan meluangkan waktu membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih bu semoga sehat selalu.
7. Segenap Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat dan masukan sehingga penulis bisa sampai saat ini.
8. Adik penulis (Intan, Aqil dan Alzam) selalu memberikan penulis semangat dan berharap baik untuk penulis. Semoga adik-adik penulis bisa menjadi kebanggaan Mama dan Bapak.
9. Keluarga besar penulis, baik dari keluarga Bapak dan keluarga Mama yang tiada hentinya memberikan dukungan dan insentif terus menerus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan skripsi Febbrika dan Indah yang selalu menemani, membantu dan berjuang bersama dalam penyusunan skripsi. Terimakasih atas kebersamaan dan suka dukanya. Semangat dan sukses untuk kedepannya.
11. Teman seperjuangan dari awal merantau di Jogja, Khai terimakasih selalu menemani dan berjuang bersama selama di Jogja. Semoga apa yang diinginkan tercapai.

12. Teman Kost Dhea terimakasih suka duka bareng selama dikost dan selalu ada ketika penulis sakit. Semoga sukses selalu.
13. Teman-teman tercinta (Oif, Eden, Rina) Terimakasih selalu menemani penulis dan berjuang bersama.
14. Sepupu penulis Arman, terimakasih selalu setia mendengar cerita dan memberikan semangat kepada penulis.

Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Haninaturrahmah Rosadi

DAFTAR ISI

Halaman sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	iii
Halaman Pengesahan	iv
Berita Acara	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vii
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	10
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	11
2.1.4 Belanja Modal	12
2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah	13
2.2 Peneliti Terdahulu	14
2.3 Hipotesis Penelitian	19
2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	19
2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	20

2.3.3	Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
2.4	Kerangka Penelitian	21
BAB III	METODE PENELITIAN	23
3.1	Populasi dan Sampel	23
3.2	Sumber Data dan Pengumpulan Data.....	23
3.2.1	Sumber Data.....	23
3.2.2	Pengumpulan Data.....	23
3.3	Definisi dan pengukuran variabel penelitian	24
3.3.1	Variabel Dependen.....	24
3.3.2	Variabel Independen	24
3.4	Metode Analisis Data	26
3.4.1	Uji Statistik Deskriptif.....	26
3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	26
3.4.3	Analisis Regresi Linear Berganda	27
3.4.4	Analisis Koefisien Determinasi.....	28
3.4.5	Uji Parsial (Uji T).....	28
BAB IV	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	30
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	30
4.2	Analisis Deskriptif Data	31
4.3	Uji Asumsi Klasik	32
4.3.1	Uji Normalitas	32
4.3.2	Uji Multikolinearitas.....	33
4.3.3	Uji Heteroskedastisitas.....	34
4.3.4	Analisis Regresi Linear Berganda	35
4.3.5	Uji T	37
4.3.6	Analisis Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R²</i>)	38
4.4	Pembahasan	39
4.4.1	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	39
4.4.2	Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	40

4.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	44
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Keterbatasan Penelitian	45
5.3 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN	49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka Penelitian.....	14
Tabel 4. 1 Daftar Sampel Kota/Kabupaten.....	30
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif.....	31
Tabel 4. 3 Uji Normalitas	32
Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas.....	34
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser	34
Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda	36
Tabel 4. 7 Uji Parsial (Uji T)	37
Tabel 4. 8 Analisis Koefisien Determinasi	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian.....	22
Gambar 4. 1 Histogram Uji Normalitas	33
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Kota/Kabupaten	49
Lampiran 2 Data Penelitian	49
Lampiran 3 Analisis Descriptive	52
Lampiran 4 Uji Normalitas	53
Lampiran 5 Uji Multikolinearitas	55
Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas	55
Lampiran 7 Uji Regresi Linier Berganda	56
Lampiran 8 Uji T	57
Lampiran 9 Koefisien Determinasi.....	57

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jumlah sampel yang digunakan penelitian ini berjumlah 10 sampel, data yang digunakan dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2017-2021, dengan metode pengambilan sampel *Non-Probability*. Teknis analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS versi 27 melalui analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif, belanja modal tidak berpengaruh atau tidak didukung data, dan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh atau tidak didukung data terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja modal, ukuran pemerintah daerah.

Abstract

This research was conducted to determine the influence of local revenue, capital expenditure and regional government size on the financial performance of local governments in City/Regency Regions in West Nusa Tenggara Province. The number of samples used in the research was 10 samples, the data used was from the 2017-2021 Budget Realization Report, with a Non-Probability sampling method. The data analysis technique in this research uses SPSS version 27 through multiple linear regression analysis. Based on the results of the analysis, it is known that local original income has a positive effect, capital expenditure has no effect or is not supported by data, and regional government size has no effect or is not supported by data on local government financial performance.

Keywords: *regional government financial performance, local original income, capital expenditure, regional government size.*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pelaksanaan yang mewajibkan pemerintah daerah agar dapat mengatur keuangan yang diperoleh dari pemanfaatan kapasitas daerah untuk mendukung dalam perluasan daerahnya sendiri Prastiwi & Aji, (2020). Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan peraturan pemerintah tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dengan tujuan untuk mengatur dan menjalankan masing-masing pemerintahan sesuai dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah pusat dalam mengelola keseluruhan penyusunan anggaran daerah masih kurang mampu oleh karena itu diterapkan kebijakan otonomi daerah. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas wewenang yang diberikan dalam Pembangunan daerah. Prinsip keadilan, demokratis, merata dan berkelanjutan merupakan wewenang otonomi daerah yang mewajibkan pemerintah daerah dapat meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat Manafe dkk, (2023).

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja pemerintah dalam bidang keuangan termasuk pendapatan dan belanja daerah yang diatur dalam perundang-undangan selama periode anggaran Mulyani & Wibowo, (2017). Kinerja pemerintah yaitu gambaran sejauh mana tujuan atau sasaran lembaga pemerintah tercapai sebagai penafsiran visi, misi dan strategi lembaga pemerintah, yaitu derajat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berjalan sesuai program dan kebijakan yang telah

ditetapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah adalah pendapatan asli daerah yang mencerminkan kemandirian daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

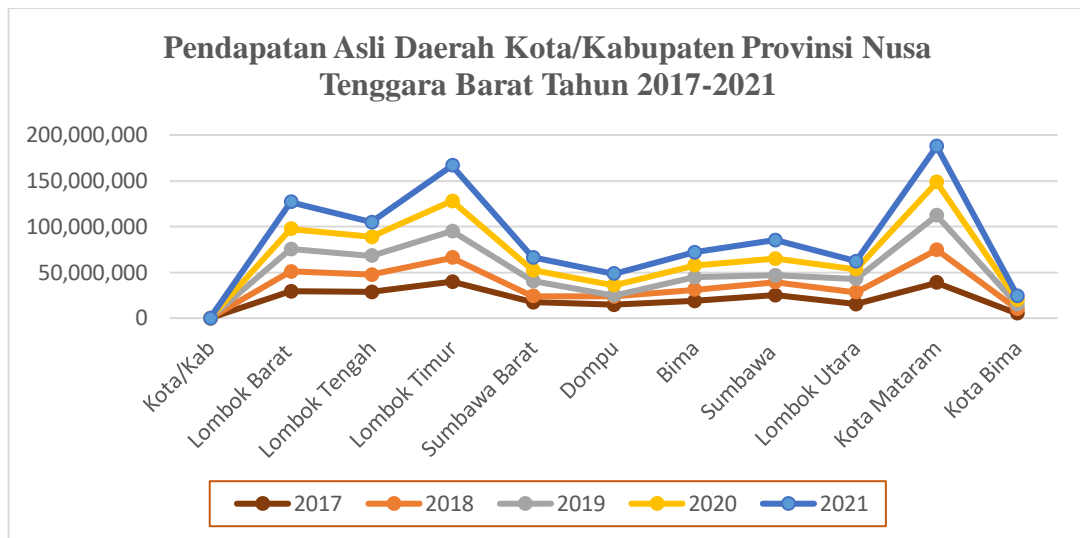
Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang didapatkan melalui pemungutan yang didasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah bentuk kecakapan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Sesuai dengan kemampuan pemerintah mendanai pengembangan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal akan menjamin tercapainya tujuan dalam perkembangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintah. Semakin pendapatan asli daerah mengalami peningkatan, membuktikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah baik (Lathifa & Haryanto, 2019). Jika sumber keuangan daerah dapat digunakan dan dikelola dengan baik, itu akan menunjukkan kinerja pemerintah daerah. Untuk meningkatkan sumber keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, diharapkan potensi yang dimiliki daerah dapat dimanfaatkan dengan baik (Taras & Artini, 2017).

Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum adalah salah satu kegiatan belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber keuangan. Berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu daerah mampu mendorong investasi yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan dan perekonomian daerah, serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Selanjutnya pendirian infrastruktur oleh pemerintah merupakan kegiatan melalui belanja modal yang berperan untuk menghasilkan sumber pendapatan asli daerah Lathifa & Haryanto, (2019). Belanja modal dapat mendorong investasi yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengatur anggaran belanja daerah yang juga terdapat belanja modal yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat (Rivandi & Anggraini, 2022).

Ukuran pemerintah daerah merupakan suatu hal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah memiliki ukuran yang besar, maka pemerintah memiliki peluang yang besar juga untuk melaksanakan penataan serta memanfaatkan sumber daya daerah. Kemampuan pemerintah menggunakan sumber daya daerahnya dan berupaya mengelola seluruh potensi dengan baik maka dipastikan pendapatan asli daerah akan meningkat.

Keuangan daerah merupakan tanggung jawab yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus memastikan bahwa pendapatan asli daerah tidak mengalami penurunan setiap periodenya. Gambar.1 1 dibawah ini merupakan data terkait pendapatan asli daerah Kota/Kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik NTB, 2023

Total pendapatan asli daerah dari gambar 1.1 dihasilkan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Dari gambar 1.1 tersebut diketahui bahwa pendapatan asli daerah di seluruh Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat sering mengalami perubahan. Berdasarkan gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lombok Timur tahun 2017 merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir dibandingkan Kota/Kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan Dompu tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu 96 persen dibandingkan dengan Kota/Kabupaten provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penerimaan pendapatan asli daerah pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Tahun 2018 mengalami penurunan dengan realisasi minus 1,79%. Penurunan yang terjadi ini salah satu yang mencerminkan bahwa kinerja keuangan pemerintah tidak stabil. Kinerja keuangan daerah yaitu salah satu cara untuk mengukur kinerja pemerintah daerah

yang bertujuan mengetahui perkembangan pencapaian strategi, serta memberikan petunjuk untuk memperoleh target yang ditetapkan.

Menurut Endang di dalam Djuniar & Zuraida (2018) kinerja pemerintah dapat dipahami sebagai prestasi yang dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Kinerja pemerintah daerah yang dapat dikatakan baik minimal dilihat dari ketercapaian pendapatan asli daerah pemerintah daerah sesuai yang ditargetkan, lebih baik lagi apabila ketercapaian pendapatan asli daerah meningkat setiap periodenya. Sehingga setiap pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat harus berusaha agar pendapatan asli daerah selalu tercapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilaksanakan oleh Lathifa & Haryanto (2019). Kebaruan penelitian ini adalah penambahan variabel independen yaitu ukuran pemerintah daerah dan teori yang digunakan teori keagenan. Menurut Manafe dkk, (2023) kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh ukuran pemerintah daerah, ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah dapat menaikkan aset daerah serta kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan informasi baik terhadap masyarakat, sehingga akan diberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Teori penelitian ini menggunakan teori keagenan, teori yang mencerminkan keterkaitan antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah (agen) dalam melaksanakan kinerja. Selain itu, cakupan wilayah penelitian ini seluruh Kota/Kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Barat dan periode penelitian tahun 2017-2021.

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah dapat memberikan dorongan pemerintah agar selalu memaksimalkan dan memperlihatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Maka pemerintah daerah salah satu kemajuan kinerjanya dapat diperhatikan dalam bidang keuangannya sesuai dengan bukti baik secara fisik maupun non fisik.

Mulyani & Wibowo (2017), melaksanakan penelitian tentang pengaruh belanja modal, ukuran pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* dan pendapatan asli daerah, hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Agustina (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah menghasilkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Lathifa & Haryanto (2019) menghasilkan penelitian bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk banyak pihak:

1. Diharapkan dapat menerapkan ilmu Akuntansi yang diperoleh semasa kuliah salah satunya Akuntansi Sektor Publik dan dapat menyalurkan pengetahuan yang lebih dalam terkait pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya yang ingin mengambil penelitian yang sejenis dan memperluas informasi terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. Pada hasil dari penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah untuk dijadikan saran atau acuan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memaparkan terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab II memaparkan terkait landasan teori, penelitian terdahulu terkait pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah. Selain itu pengembangan hipotesis serta kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III memaparkan terkait penentuan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV memaparkan hasil analisis data dalam penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori berkaitan dengan dua belah pihak yang melaksanakan perjanjian, yaitu pihak yang memberi otoritas (*principal*) dan yang menerima otoritas (agen). Teori keagenan berisi bahwa agen dan prinsipal mempunyai akses langsung untuk mendapatkan berbagai informasi, dan akuntabilitas harus didistribusikan diberbagai tempat agar menghindari kemungkinan penipuan dan korupsi. Jadi teori agensi bagi pihak pemerintah daerah (agen) bekerja terhadap nama masyarakat (*principal*). Agen memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan aset yang dapat memberikan peningkatan potensi peningkatan bagi prinsipal (Ardelia dkk, 2022).

Keterkaitan keagenan juga dapat dilihat dari anggaran organisasi sektor publik. Anggaran yang sudah ditetapkan digunakan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan setelah adanya pengesahan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah wajib mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran terhadap pemerintah pusat. Menurut Veny dkk, (2019) salah satu permasalahan yang muncul dalam teori keagenan adalah asimetri informasi yaitu pihak pemerintah (agen) mempunyai banyak informasi dibandingkan pihak masyarakat (*principal*). Jika tidak adanya asimetri informasi, maka agen dapat melakukan kecurangan terhadap *principal*, untuk menghindari hal ini terjadi, evaluasi kinerja pemerintah harus dilakukan dengan teratur. Evaluasi ini dapat membantu

mengawasi dan memastikan bahwa operasi keuangan daerah dijalankan sesuai dengan undang-undang yang sah.

Hubungan teori keagenan dengan penelitian ini yaitu pemerintah sebagai agen yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan strategi agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal serta kepuasan masyarakat sebagai prinsipal. Evaluasi terhadap kinerja pemerintah khususnya dalam bidang keuangan dilaksanakan dengan teratur agar tidak adanya kecurangan dan transparansi terhadap masyarakat (*principal*).

2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Penggunaan program keuangan pemerintah daerah yang mencakup pendapatan dan pengeluaran daerah selama periode anggaran melalui mekanisme keuangan yang ditetapkan oleh undang-undang atau aturan, menentukan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan merupakan contoh pencapaian kegiatan kerja pemerintah daerah yang ditujukan untuk mencapai tujuan, visi dan misi daerah yang diukur dengan menggunakan standar keuangan yang diperiksa dari laporan keuangan yang disusun oleh otoritas daerah terkait (Ramahdani Fitri & Sri, 2022).

Menurut Yulianti, (2018), pengukuran kinerja keuangan pemerintah yaitu kegiatan mengevaluasi pencapaian tujuan tertentu yang didasarkan pada tujuan organisasi. Kinerja Keuangan Pemerintah suatu pencapaian yang terdapat dalam bidang keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa diperlukan adanya Pengelolaan keuangan

daerah yang maksimal memerlukan proses pengelolaan yang berkesinambungan dan dijalankan dengan baik.

Kinerja Keuangan Pemerintah merupakan bukti dalam capaian tingkat keberhasilan pemerintah bekerja dalam bidang keuangan dan memiliki tujuan untuk memahami kemampuan dalam mengelola keuangan daerah (Angraini & Hidayat, 2023). Menurut Fera & Rhea (2019) ukuran untuk kinerja keuangan pemerintah ada enam yaitu: rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, rasio keserasian belanja dan rasio pertumbuhan. Dalam penelitian ini pengukuran kinerja keuangan pemerintah yang digunakan adalah rasio efisiensi. Rumus rasio efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan penghasilan yang berasal dari pendapatan yang didapatkan dari kapasitas daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada pasal 1 berisi bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penghasilan yang didapatkan sesuai dengan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang tersebut bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Heryanti dkk, (2019) pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu terus didorong perluasannya. Dalam sistem otonomi daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sangat bergantung pada kemandirian pemerintah daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendanaan pusat, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, karena peningkatan pendapatan asli daerah yang diterima menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengoptimalkan kinerja dan potensi yang ada pada daerah (Ramahdani Fitri & Sri, 2022).

2.1.4 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan aset tetap yang didapatkan pemerintah melalui pengeluaran suatu anggaran, dan dinilai dari pemakaian anggaran oleh pemerintah daerah. Pengeluaran dalam belanja modal digunakan untuk aset jangka panjang daerah misalnya bangunan, tanah, peralatan dan barang tidak berwujud (Prastiwi & Aji, 2020). Salah satu pengeluaran pemerintah daerah adalah belanja modal, yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lainnya yang menguntungkan selama periode akuntansi. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah daerah juga diukur dari hasil implementasi rencana melalui penggunaan belanja modal.

Belanja modal yaitu salah satu pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat

dalam periode akuntansi, maka keberhasilan pemerintah juga dilihat dari hasil dalam menjalankan rencana dengan penggunaan belanja modal. Apabila hasil dari pelaksanaan belanja modal baik dan memuaskan sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja pemerintah daerah kompeten.

Menurut Veny dkk., (2019) Belanja modal dikelompokkan menjadi dua macam belanja yaitu belanja publik dan belanja aparatur; (a) belanja publik yaitu belanja modal seperti investasi fisik yang mempengaruhi penambahan aset dan memiliki nilai ekonomis lebih dari satu tahun, (b) belanja aparatur merupakan belanja yang dirasakan langsung oleh aparatur dan memiliki manfaat tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat.

2.1.5 Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah dilihat dari banyaknya jumlah penduduk, bahwa setiap Kota/Kabupaten memiliki jumlah penduduk dan anggaran yang berbeda. Sehingga semakin besar ukuran pemerintah dapat membantu operasi pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Manafe dkk, (2023). Ukuran pemerintah dalam penelitian ini dilihat dari total aset pada pemerintah daerah, aset yang besar diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih besar juga kepada masyarakat. Menurut Ramahdani & Sri (2022) ukuran pemerintah yang besar dapat memberikan aktivitas operasional pemerintahan di suatu wilayah yang dibarengi dengan meningkatnya kinerja pemerintah daerah. Skala pemerintahan yang besar, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang besar juga dalam mengungkapkan kinerjanya.

2.2 Peneliti Terdahulu

Berikut hasil penelitian terdahulu dengan topik serupa dijadikan referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
1.	(Mulyani & Wibowo, 2017)	Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015)	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Independen: Belanja Modal, Ukuran Pemerintah, <i>Intergovernmental Revenue</i> dan Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan Ukuran Pemerintah Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i> , dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan
2.	Lathifah Ridla Agustina (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Ukuran Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Dana Perimbangan:

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
		Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia	Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah	<p>1. DAU tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah</p> <p>2. DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.</p> <p>Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah.</p> <p>Ukuran Pemerintah Daerah yang diproksikan dengan total aset berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.</p>
3.	(Aristy & Achyani, 2019)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerinatah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	<p>Independen: Karakteristik Pemerintah Daerah (ukuran pemerintah daerah (<i>size</i>), <i>Intergovernmental Revenue</i>, Belanja Daerah, dan <i>Leverage</i>.)</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Ukuran Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p><i>Intergovernmental Revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
				<p>kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p><i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
4.	(Heryanti dkk., 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Kontrol: Belanja Modal</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja modal berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
5.	(Angraini & Hidayat, 2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah</p> <p>Dependen:</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja Daerah berpengaruh positif</p>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
		Kabupaten dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021	Kinerja keuangan daerah	terhadap kinerja keuangan pemerintah.
6.	(Lathifa & Haryanto, 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017	Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
7.	(Ardelia dkk, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Kabupaten dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020)	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
8.	(Putri & Darmayanti, 2019)	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: PAD dan Dana Perimbangan Dependen:	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil penelitian
		di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi Bali
9.	(Veny dkk, 2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	<p>Independen: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal</p> <p>Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p> <p>Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>
10.	(Rivandi & Anggraini, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	<p>Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal</p> <p>Dependen: Kemandirian</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kemandirian keuangan daerah</p> <p>Belanja Modal berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah</p>

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan perolehan pendapatan yang dilakukan melalui pemungutan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku. Perubahan yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan keberhasilan kinerjanya salah satu faktor pendukung adalah pendapatan asli daerah dapat memberikan peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai semua kegiatan daerah yang menunjukkan kinerja yang baik Pratiwi & Aji, (2020).

Pendapatan asli daerah kaitannya dalam keagenan merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat kepada pemerintah daerah seperti pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah sebagai agen memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut untuk memajukan kegiatan agar berhasil tujuan organisasi. Apabila pemerintah daerah mempunyai pengelolaan keuangan yang baik, hal ini dapat menggambarkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk meminimalkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat Andaresta dkk (2021).

Veny dkk (2019) menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Papua Barat berpengaruh positif oleh Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan penjelasan diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.3.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja Modal merupakan anggaran yang dialokasikan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu periode (Rivandi & Anggraini, 2022). Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Tanah, Peralatan, dan Belanja Aset lainnya. Pemerintah mendirikan infrastruktur sarana dan prasarana terlihat pada belanja modal. Belanja modal yang besar merupakan hasil dari pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana, apabila semakin banyak pembangunan maka akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah sebagai pihak agen bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dimana masyarakat sebagai pricipal merasakan manfaat baik secara langsung dan tidak langsung melalui belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Besarnya belanja modal mencerminkan besarnya infrastruktur dan fasilitas yang dibangun.

Ardelia dkk, (2022), menyatakan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif oleh Belanja Modal. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

Ukuran pemerintah daerah diukur dengan menggunakan total aset. Apabila total aset tinggi maka dapat memberikan kelancaran pemerintah daerah dalam melakukan kegiatan operasional yang bertujuan untuk memberikan fasilitas dan sumberdaya terhadap masyarakat. Semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah semakin baik juga kinerja keuangan yang diberikan. Besar nya pemerintah daerah maka aset yang besar akan memperoleh tinjauan yang besar juga dari masyarakat terkait pengelolaan pemerintah daerah. Tinjauan dari masyarakat sebagai pihak *principal* secara tidak langsung memberikan tanggung jawab kepada pemerintah sebagai agen, agar mampu mengendalikan aset daerah dengan bijak, karena tanggung jawab pemerintah (agen) meningkat seiring dengan pengendalian meningkat.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Aristy & Achyani, (2019) menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif oleh ukuran pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Ukuran Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

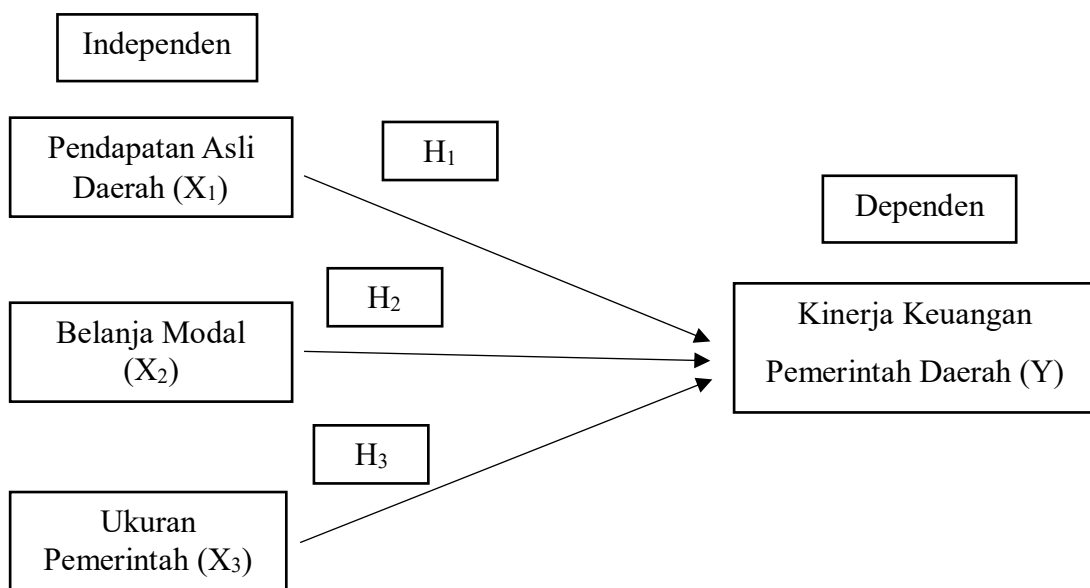
2.4 Kerangka Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu terkait pendapatan asli daerah, belanja modal

dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Model penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah semua Kabupaten dan Kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Non-Probability* yaitu mengambil semua anggota populasi untuk objek penelitian Sugiyono (2013). Setiap pemerintah daerah akan diambil data keuangannya yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah seluruh Kota dan Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021.

3.2 Sumber Data dan Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti atau didapatkan dari pihak lain. Data bersumber dari Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kota/Kab di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017-2021. Data diperoleh dari *website* resmi pemerintah daerah www.djpk.depkeu.go.id dan www.ntb.bps.go.id.

3.2.2 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dokumen, yaitu data yang di publikasi dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Metode dokumen yang digunakan yaitu mengumpulkan data berupa Laporan

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat secara *online* melalui informasi publik.

3.3 Definisi dan pengukuran variabel penelitian

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dapat diukur dengan melihat efisiensi pelayanan terhadap Masyarakat (Aristy & Achyani, 2019). Pemerintah daerah dianggap efisien dalam melaksanakan pemungutan pendapatan ketika rasionya kurang dari satu atau dibawah dari seratus persen.

Rasio efisiensi berfungsi sebagai acuan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah karena membandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan dan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik jika rasio efisiensinya semakin rendah.

Rumus menghitung rasio efisiensi yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Relisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

3.3.2 Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Penelitian ini

menggunakan tiga variabel independen, yaitu pendapatan asli daerah (X_1), belanja modal (X_2), dan ukuran pemerintah daerah (X_3).

3.3.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat diperoleh dengan cara dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Cara mengukur pendapatan asli daerah yaitu:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.}$$

3.3.2.2 Belanja Modal

Berdasarkan UU No.71 Tahun 2010, Belanja Modal yaitu anggaran belanja dalam memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang mempunyai jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal merupakan anggaran yang dialokasikan untuk belanja aset yang memiliki keuntungan lebih dari satu periode akuntansi dan bermanfaat untuk aktivitas pemerintah (Rivandi dan Anggraini, 2022).

Cara menghitung belanja modal yaitu:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap Lainnya.}$$

3.3.2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Aset pemerintah daerah mencerminkan sumber daya ekonomi yang ada, ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan melihat total aset (Aristy & Achyani, 2019). Total aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya yang dapat dilihat dalam laporan neraca pemerintah daerah.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan uji hipotesis berupa uji regresi linear berganda (*multiple regression*). Dalam melakukan uji regresi linear berganda maka harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas dengan menggunakan alat bantu SPSS 27.

3.4.1 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran mengenai variabel-variabel penelitian. Gambaran statistik deskriptif dapat dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varians, maksimum, minimum, range, kurtosis, dan *skewness* (Prastiwi & Aji, 2020).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

3.4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Pada uji normalitas dasar

pengambilan keputusan jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah adanya korelasi dengan variabel bebas. Dalam pengambilan keputusannya dapat dilihat dari nilai *tolerance*. Dikatakan multikolinearitas apabila nilai *tolerance* < 10 atau nilai *tolerance* > 0,10 maka multikolinearitas.

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang dilakukan untuk menganalisis apakah terdapat ketidaksamaan atau tidak pada varian. Dalam uji heteroskedastisitas untuk membuktikannya dengan cara melihat grafik *scatterplot*. Heteroskedastisitas tidak terjadi apabila *scatterplot* tidak membentuk pola dan hanya mengandung titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y (Veny, dkk 2019).

3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana hubungan antara dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Berikut persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Y	= Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X ₁	= Pendapatan Asli Daerah
X ₂	= Belanja Modal
X ₃	= Ukuran Pemerintah Daerah
ε	= Error Term Model

3.4.4 Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi menunjukkan keterlibatan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R^2) besarnya dari 0-1. Apabila nilai koefisien determinasi (R^2) mendekati angka nol maka variabel independen mampu memberikan seluruh informasi yang diperlukan oleh variabel dependen, Namun, apabila nilai R^2 yang mendekati angka satu maka variabel independen memiliki informasi yang sangat terbatas untuk variabel dependen.

3.4.5 Uji Parsial (Uji T)

Uji parsial bertujuan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai $t < 0,05$ maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji T (t-test) dapat digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan seberapa signifikansi pengaruh variabel independen (pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah) terhadap variabel dependen

(kinerja keuangan pemerintah daerah). Hasil dari uji ini dapat dilihat dalam tabel koefisien di kolom signifikansi.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dan dianalisis menggunakan rasio efisiensi. Variabel independen yang dipakai yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah.

Objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta banyak juga pulau-pulau kecil lainnya. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 10 sampel yang terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota. Seluruh Kota/Kabupaten tersebut, semuanya memenuhi kriteria pengambilan sampel. Seluruh data diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021 yang diakses melalui www.ntb.bps.com dan www.djp.kemenkeu.

Tabel 4. 1 Daftar Sampel Kota/Kabupaten

No	Kota/Kabupaten
1.	Kab. Lombok Barat
2.	Kab. Lombok Tengah
3.	Kab. Lombok Timur
4.	Kab. Sumbawa Barat
5.	Kab. Dompu
6.	Kab. Bima
7.	Kab. Sumbawa

No	Kota/Kabupaten
8.	Kab. Lombok Utara
9.	Kota Mataram
10.	Kota Bima

4.2 Analisis Deskriptif Data

Analisis Statistik Deskriptif memberikan deskripsi tentang variabel-variabel penelitian, yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	50	1.054.589	39.808.846	18.872.930,28	10.693.946,293
Belanja Modal	50	11.863.409	46.990.109	28.411.437,14	10.112.478.189
Ukuran Pemerintah	50	138.450.636	389.521.992	255.980.380,44	70.808.953,283
Kinerja Keuangan	50	0	40.060.862	5.376.143,94	7.416.432,961

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 diperoleh bahwa nilai minimum pendapatan asli daerah yaitu 1.054.589 yang dimiliki oleh Kabupaten Dompu pada tahun 2019, sedangkan nilai maksimum yaitu 39.808.846 dimiliki oleh Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2017. Rata-rata (*mean*) pendapatan asli daerah adalah 18.872.930,28 dengan standar deviasi 10.693.946,293.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai belanja modal terendah sebesar 11.863.409 pada tahun 2020, sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki nilai

belanja modal tertinggi sebesar 46.990.109 pada tahun 2017. Rata-rata (*mean*) belanja modal adalah 28.411.437,14 dengan standar deviasi 10.112.478.189.

Kota Bima memiliki ukuran pemerintah daerah terendah sebesar 138.450.636 pada tahun 2017 sedangkan Kabupaten Lombok Timur memiliki ukuran pemerintah daerah tertinggi sebesar 389.521.992 pada tahun 2021. Rata-rata (*mean*) ukuran pemerintah daerah adalah 255.980.380,44 dengan standar deviasi 70.808.953,283.

Beberapa Kota/Kabupaten seperti Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima, memiliki nilai kinerja keuangan pemerintah minimum nol (0) sedangkan Kabupaten Lombok Barat memiliki nilai kinerja keuangan maksimum sebesar 40.060.862 pada tahun 2019. Rata-rata (*mean*) kinerja keuangan pemerintah adalah 5.376.143,94 dengan standar deviasi 7.416.432,961.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas) dilakukan sebelum uji regresi linear berganda.

4.3.1 Uji Normalitas

Dalam uji normalitas metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Data dianggap berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 4.3.

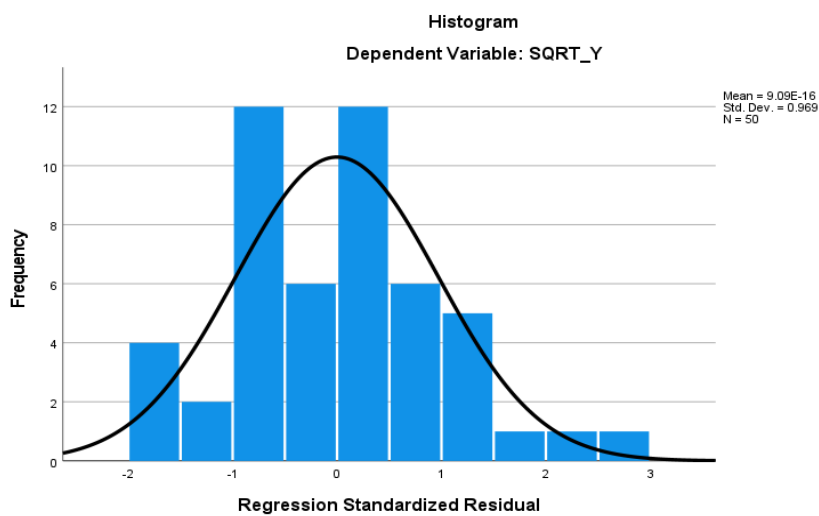
Tabel 4. 3 Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	50
Asymp. Sig (2-tailed)	0,200

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3, bahwa nilai signifikansi tes *One-Sample Kolmogrov-Smirnov* adalah sebesar 0,200. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal. Tampilan uji histogram normalitas dapat dilihat dibawah ini:

Gambar 4. 1 Histogram Uji Normalitas



4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat dari VIF. Model regresi dikatakan bebas dari uji multikolinearitas jika nilai tolerance lebih dari 10% dan VIF kurang dari 10.

Model regresi yang baik adalah variabel independen yang tidak terdapat korelasi antar variabel.

Tabel 4. 4 Uji Multikolinearitas

Variabel Penelitian	<i>Tolerance</i>	VIF
Pendapatan Asli Daerah	0,453	2.207
Belanja Modal	0,756	1.323
Ukuran Pemerintah	0,456	2.195

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa hasil *tolerance* dan VIF pada seluruh variabel telah memenuhi syarat yaitu nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10. Hasil dari uji tersebut bahwa tidak adanya korelasi dan model regresi bebas dari multikolinearitas.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi memiliki perbedaan varians atas residual antara dua pengamatan. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji *Glejser*. Hasil *Glejser* dengan nilai > dari 0,05 menunjukkan tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dilihat pada tabel 4.5.

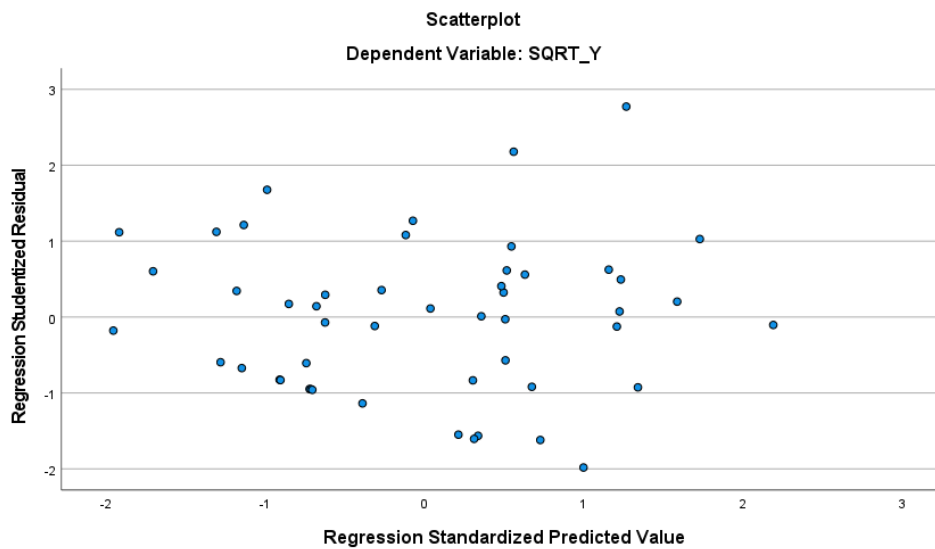
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Variabel Penelitian	Nilai Sig
Pendapatan Asli Daerah	0,967
Belanja Modal	0,525
Ukuran Pemerintah	0,971

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen dengan uji glejser menunjukkan nilai lebih dari 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa heteroskedastisitas tidak terjadi. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan *Scatterplot* ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut:

Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot



Berdasarkan gambar 4.2 diatas bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas karena pola titik-titik persebaran data tidak beraturan antara nilai nol di sumbu Y. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

4.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Dengan menggunakan SPSS 27, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui besar nya pengaruh variabel pendapatan asli daerah (X_1), belanja modal (X_2), dan ukuran pemerintah (X_3) terhadap kinerja

keuangan pemerintah (Y). Berdasarkan dari hasil regresi linear disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			
	<i>B</i>	<i>Standard Error</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
Constant	-301.848	1539.484	-0,196	0,845
Pendapatan Asli Daerah	0,600	0,220	2.732	0,009
Belanja Modal	0,427	0,224	1.905	0,063
Ukuran Pemerintah Daerah	-0,168	0,123	-1.360	0,181

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = (-301.848) + 0,600X_1 + 0,427X_2 + (-0,168) X_3$$

Keterangan:

Y = Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

X₁ = Pendapatan Asli Daerah

X₂ = Belanja Modal

X₃ = Ukuran Pemerintah Daerah

Dari persamaan regresi linear berganda, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta sebesar -301.848 yang berarti bahwa jika pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah nol maka kinerja pemerintah daerah negatif atau tidak berpengaruh positif.

2. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,600. Nilai tersebut bernilai positif yang dapat diartikan bahwa, apabila variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,600.
3. Nilai koefisien Belanja Modal bernilai positif sebesar 0,427. Artinya jika variabel belanja modal meningkat maka kinerja keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat sebesar 0,427.
4. Nilai koefisien Ukuran Pemerintah Daerah sebesar -0,168. Nilai tersebut bernilai negatif yang berarti hubungan pengaruhnya berlawanan dan apabila variabel Ukuran Pemerintah Daerah mengalami peningkatan maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah akan menurun sebesar 0,168.

4.3.5 Uji T

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Variabel independen dikatakan berpengaruh apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Namun apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dari uji T dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		
	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
Constant	-301.848	-0,196	0,845
Pendapatan Asli Daerah	0,600	2.732	0,009

Model	Unstandardized Coefficients		
	<i>B</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
Belanja Modal	0,427	1.905	0,063
Ukuran Pemerintah Daerah	-0,168	-1.360	0,181

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut bahwa **H₁ diterima/didukung data**, artinya pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Nilai signifikansi variabel belanja modal sebesar 0,063 atau $> 0,05$. Hal tersebut bahwa **H₂ ditolak/tidak didukung data**, artinya belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Nilai signifikansi variabel ukuran pemerintah daerah sebesar 0,181 atau $>0,05$. Hal tersebut bahwa **H₃ ditolak/tidak didukung data**, artinya ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.3.6 Analisis Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4. 8 Analisis Koefisien Determinasi

R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,527	0,277	0,230

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,230 atau 23%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 23%. Sedangkan nilai sisanya 77% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memengaruhi kinerja keuangan pemerintah Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,600. Dapat diartikan bahwa semakin meningkat variabel pendapatan asli daerah maka kinerja keuangan pemerintah daerah semakin meningkat juga sebesar 0,600 atau pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari kemampuan yang dimiliki oleh daerah menurut peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah memiliki peran penting untuk daerah dan dapat dikelola oleh pemerintah guna mendukung kesejahteraan masyarakat setempat. Apabila pendapatan

asli daerah dikelola dengan baik maka dapat memberikan pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Heryanti (2019), Lathifa & Haryanto (2019), Veny (2019) dan Ardelia (2022) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Apabila pendapatan asli daerah semakin tinggi maka akan mempengaruhi tingginya kinerja keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki kemandirian dalam pengelolaan membiayai pengeluaran daerah berarti menunjukkan pendapatan asli daerah yang tinggi Prastiwi & Aji., (2020). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mulyani & Wibowo., (2017) pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021. Hal ini dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,063 > 0,05$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,427. Dapat diartikan bahwa semakin meningkat variabel belanja modal maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat juga sebesar 0,427.

Hal ini berarti, meningkatnya Belanja Modal yang dikeluarkan mengakibatkan penurunan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah.

Begitupun sebaliknya, menurunnya Belanja Modal yang dikeluarkan mengakibatkan peningkatan Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah. Hasil pengaruh negatif antara belanja modal dengan kinerja keuangan daerah menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan kinerja perekonomian pemerintah daerah tahun 2017 sampai 2021.

Selain itu, investasi daerah di bidang infrastruktur atau pembangunan infrastruktur tidak mampu menghasilkan sumber pembiayaan baru sehingga memperlambat pertumbuhan efisiensi perekonomian daerah. Selain itu, kualitas belanja modal daerah dan kualitas hasilnya yang jauh dari apa yang diinginkan masyarakat dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan indikator perekonomian daerah. Investor kecewa ketika aktivitas infrastruktur tidak memenuhi kualitas yang dibutuhkan sehingga mengganggu proses penanaman modal yang dapat memicu peningkatan aktivitas perekonomian daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Antari & Sedana (2018) yang menyatakan bahwa investasi mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat ekonomi eksklusif yang diakibatkan oleh buruknya kualitas atau tidak meratanya pemerataan pembangunan yang dilakukan. Pembangunan yang tidak merata antar daerah menyebabkan pertumbuhan indikator

perekonomian daerah tidak dapat meningkat. Keadaan ini dikarenakan penanaman modal yang tepat dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi perekonomian daerah. Menyalurkan investasi ke dalam pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan sumber daya keuangan dapat menambah nilai hasil pengelolaan perekonomian pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Lathifa & Haryanto(2019) dan (Ardelia dkk (2022) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017-2021. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,181 > 0,05$ dan nilai koefisien bernilai negatif sebesar $-0,168$. Dapat diartikan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah meningkat maka variabel kinerja keuangan pemerintah menurun sebesar $-0,168$.

Ukuran pemerintah daerah dapat dilihat dari total aset daerah, pemerintah daerah yang besar memiliki tekanan yang kuat untuk mengungkapkan kinerja keuangan pemerintah tersebut Rahma Putri & Amanah (2020). Dalam penelitian ini ukuran pemerintah yang diukur melalui total aset tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat maka semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Saraswati & Rioni (2019) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah ditolak atau tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil pengaruh negatif tidak signifikan antara ukuran pemerintah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa total aset tidak memberikan pengaruh terhadap meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021. Pemerintah daerah memiliki aset tetapi belum mampu memberikan layanan yang baik untuk masyarakat sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah tidak meningkat. Ukuran pemerintah daerah yang kecil bahwa pemerintah memiliki aset yang kecil sehingga pengamatan dari masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan pemerintah tidak ketat. Pengawasan masyarakat dapat memberikan dampak terkait dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah serta masyarakat dapat mengakui kinerja pemerintah daerah secara kompeten.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Mulyani & Wibowo (2017) dan Lathifah Ridla (2018) yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang masalah yang dirumuskan dalam hipotesis pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan peningkatan kinerja pemerintah dapat.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021 tidak dipengaruhi oleh Belanja Modal. Ini berarti kegiatan belanja modal yang dikelola oleh pemerintah daerah tidak dapat memberikan kontribusi untuk pendapatan daerah, sehingga tidak dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah dengan baik.
3. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017-2021. Ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki oleh setiap Kota/Kabupaten tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk melayani masyarakat. Pelayanan kurang kompeten yang diberikan

pemerintah daerah kepada masyarakat disebabkan karena aset yang tidak memadai sehingga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam dilaksanakan penelitian ini ditemukan beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti sekadar Kota/Kabupaten yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Variabel yang digunakan hanya pendapatan asli daerah, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah. Jika peneliti memasukan variabel-variabel terkait, mungkin saja akan memperoleh hasil yang berbeda.

5.3 Saran

Berlandaskan hasil akhir penelitian, kesimpulan dan keterbatasan penelitian sehingga peneliti menyarankan:

1. Penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, dapat memakai variabel independen lain seperti Belanja Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum atau dapat menggunakan variabel lainnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Serta dapat menggunakan lebih banyak lagi sampel pemerintahan dengan periode yang lebih lama lagi.
2. Khusus pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, L. R. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah (pad), dana perimbangan, belanja modal dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi di indonesia.*
- Andaresta, H., Aswar, K., & Ermawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Size Pemerintah Daerah, dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Prosiding Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 2, 1614–1624. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227/882>
- Angraini, N., & Hidayat, T. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2), 141–163. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit/article/view/737>
- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Apridiyanti, A. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Jawa Barat 2013-2017. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 4(3), 32–41. <https://doi.org/10.29407/jae.v4i3.12822>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Aristy, T., & Achyani, F. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah). *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammdiyah Surakarta, Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper*, 710–721. <http://hdl.handle.net/11617/11417>
- bps. (2023). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.*
- Djuniar, L., & Zuraida, I. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Belanja Modal Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. *BALANCE Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 445. <https://doi.org/10.32502/jab.v3i2.1447>
- Fera, M., & Rhea. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada pemerintah provinsi

- kalimantan barat). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 11–22.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, & Suryono, B. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(8), 1–21.
- Husna, A. U., Susanti, D., & Padang, U. N. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan di Kabupaten Solok Universitas Negeri Padang This exploration delegated a similar causal examination . The information used is the regional government financial plan (APBD) repor. *Universitas Negeri Padang*, 01(2), 153–163.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Lestari Endri, H. W. D. (2020). *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. 7(2), 1–8.
- Machmud, J., & Radjak, L. I. (2018). Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Journal of Accounting Science*, 2(1), 17–32. <https://doi.org/10.21070/jas.v2i1.1106>
- Manafe, H. A., Niha, S. S., & Putra, D. P. S. (2023). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah , Leverage Dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(3), 541–547.
- Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental Revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah,Tahun 2012-2015). *Kompartemen*, XV(1), 57–66.
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(5), 2834. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i05.p09>
- Rahma Putri, R. A., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1–20. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3620>

- Ramahdani Fitri, A., & Sri, T. (2022). The effect of government size and regional original income (roi) on financial performance in the government of the city of surabaya. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6, 301–310.
- Rivandi dan Anggraini. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 20(1), 1–12.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 110–120.
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.
- Veny, V., Anah, S., & Hariani, S. (2019). Dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(2), 329–338. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i2.277>
- Yuliasti, L., Amran, T. N., & Jacline, I. S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(05), 164–174.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Sampel Kota/Kabupaten

No	Kota/Kabupaten
1.	Kab. Lombok Barat
2.	Kab. Lombok Tengah
3.	Kab. Lombok Timur
4.	Kab. Sumbawa Barat
5.	Kab. Dompu
6.	Kab. Bima
7.	Kab. Sumbawa
8.	Kab. Lombok Utara
9.	Kota Mataram
10.	Kota Bima

Lampiran 2 Data Penelitian

Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Ukuran Pemerintah	Rasio Efisiensi
Lombok Barat				
2017	29.099.358.314.435	39.144.127.928.844	214.129.858.608.330	0,019581 669
2018	21.692.127.950.590	31.623.494.608.630	237.041.616.877.894	0,012354 06
2019	24.711.535.348.516	44.472.840.928.983	267.668.286.930.861	0,040060 862
2020	21.903.870.394.665	35.637.943.081.900	285.615.621.684.098	0,025648 155
2021	29.490.115.291.097	20.450.471.313.550	292.988.772.896.867	0,009048 54
Lombok Tengah				
2017	28.669.138.441.465	36.852.540.680.230	268.015.436.327.444	0,011516 208
2018	18.732.472.197.060	35.893.516.990.800	280.826.492.969.874	0

Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Ukuran Pemerintah	Rasio Efisiensi
2019	20.451.259.914.212	41.338.770.059.162	315.274.278.714.706	0,004578 053
2020	20.641.940.562.590	28.254.518.504.379	322.736.694.140.869	0,009491 471
2021	16.307.751.290.058	22.585.258.884.575	355.784.701.799.004	0,009433 037
Lombok Timur				
2017	39.808.846.054.131	46.990.109.389.758	297.046.677.604.890	0,011476 539
2018	26.193.137.763.096	37.673.595.018.559	327.570.865.599.385	0,006299 7
2019	28.962.150.012.436	46.387.041.543.588	350.159.040.347.828	0,012176 106
2020	32.811.052.062.086	28.337.939.632.835	368.989.735.070.979	0,008805 696
2021	38.684.622.059.448	40.672.675.590.258	389.521.991.872.548	0,002775 085
Sumbawa				
2017	24.952.615.652.427	40.553.601.437.100	287.587.902.888.413	0
2018	14.394.392.143.024	32.261.342.160.622	306.346.072.527.563	0
2019	16.393.132.523.096	44.588.599.208.280	327.319.640.705.977	0
2020	18.131.199.039.199	21.426.579.660.800	329.947.746.505.309	0,000167 349
2021	20.285.637.432.841	18.438.979.806.700	327.366.632.117.615	0
Dompu				
2017	14.379.976.841.900	24.471.675.789.542	151.363.313.065.522	0
2018	9.328.912.351.560	24.749.869.059.100	161.282.796.087.890	0,001881 848
2019	1.054.589.098.512	24.874.700.602.700	176.354.730.252.537	0
2020	11.068.493.158.311	13.317.650.291.350	172.655.527.270.232	0
2021	12.582.361.929.005	13.760.240.334.452	172.877.867.057.128	0
Bima				
2017	18.820.381.421.605	29.158.459.981.800	230.818.507.751.152	0,004286 041

Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Ukuran Pemerintah	Rasio Efisiensi
2018	12.034.297.275.652	39.665.545.403.204	252.441.507.444.968	0,003786 063
2019	13.587.414.156.057	31.613.432.276.910	269.054.365.516.221	0,004080 307
2020	13.158.554.904.249	25.602.294.596.400	270.503.357.383.754	0,001397 851
2021	14.170.825.776.590	26.157.586.888.300	291.415.137.678.291	0,002740 899
Sumbawa Barat				
2017	17.163.285.526.226	45.176.341.577.955	287.587.902.888.413	0,011496 587
2018	6.681.035.719.303	35.702.711.755.550	234.232.609.519.136	0,001990 525
2019	7.286.994.514.229	23.625.629.658.165	232.845.910.695.388	0,001627 275
2020	11.996.198.839.416	11.863.408.526.000	221.063.997.917.290	0
2021	14.179.263.953.435	14.686.603.567.310	221.984.843.203.540	0,001730 025
Lombok Utara				
2017	15.094.955.310.769	27.170.102.121.658	139.162.816.577.998	0,008782 026
2018	13.107.496.861.897	20.243.164.445.280	153.163.568.758.463	0,011035 572
2019	14.677.164.271.975	33.623.422.205.140	188.519.698.020.231	0,006672 159
2020	10.345.010.703.612	12.793.430.272.600	185.743.166.572.579	0,005814 786
2021	8.739.572.427.785	13.449.841.384.094	188.930.392.195.368	0,004688 433
Kota Mataram				
2017	38.695.823.287.350	33.449.351.423.790	290.963.030.136.646	0,010850 568
2018	35.882.582.220.830	31.682.222.518.635	311.164.745.254.133	0,006623 927
2019	37.395.142.233.915	33.156.094.366.474	336.154.251.178.116	0,008080 417
2020	36.316.536.101.056	20.906.641.133.500	338.660.385.008.012	0,002146 833

Kota/Kab	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Modal	Ukuran Pemerintah	Rasio Efisiensi
2021	39.255.612.424.149	18.554.661.553.420	349.925.101.118.662	0,007042 818
Kota Bima				
2017	5.246.517.025.796	24.495.973.798.700	138.450.636.370.897	0
2018	4.611.543.651.262	23.461.848.230.794	142.462.636.541.006	0
2019	5.042.285.505.289	19.164.968.189.571	150.165.918.029.283	0
2020	4.727.981.793.669	16.572.137.547.502	192.250.367.328.920	0,001397 851
2021	4.699.351.674.667	13.837.899.056.474	194.881.865.808.550	0,002740 899

Lampiran 3 Analisis Descriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	50	1054589	39808846	18872930.28	10693946.293
Belanja Modal	50	11863409	46990109	28411437.14	10112478.189
Ukuran Pemerintah Daerah	50	138450636	389521992	255980380.44	70808953.283
Kinerja Keuangan Pemerintah	50	0	40060862	5376143.94	7416432.961
Valid N (listwise)	50				

Lampiran 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1286.50821505	
Most Extreme Differences	Absolute	.074	
	Positive	.072	
	Negative	-.074	
Test Statistic		.074	
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d	
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.702	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.690
		Upper Bound	.714

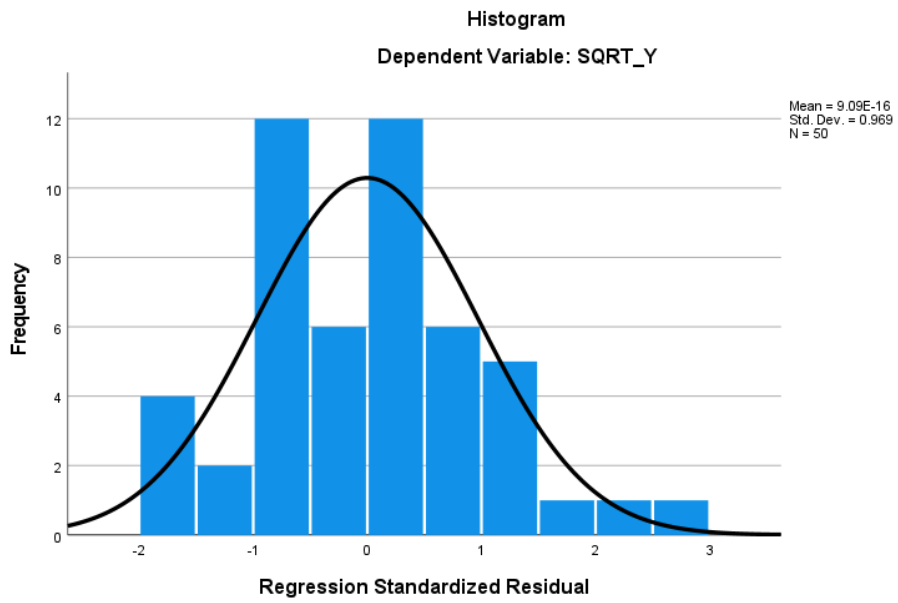
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

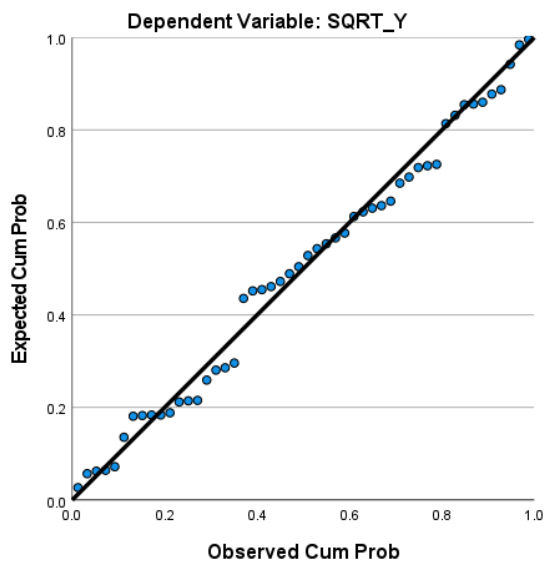
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Lampiran 5 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	SQRT_X1	.474	2.110
	SQRT_X2	.729	1.373
	SQRT_X3	.410	2.437

a. Dependent Variable: SQRT_Y

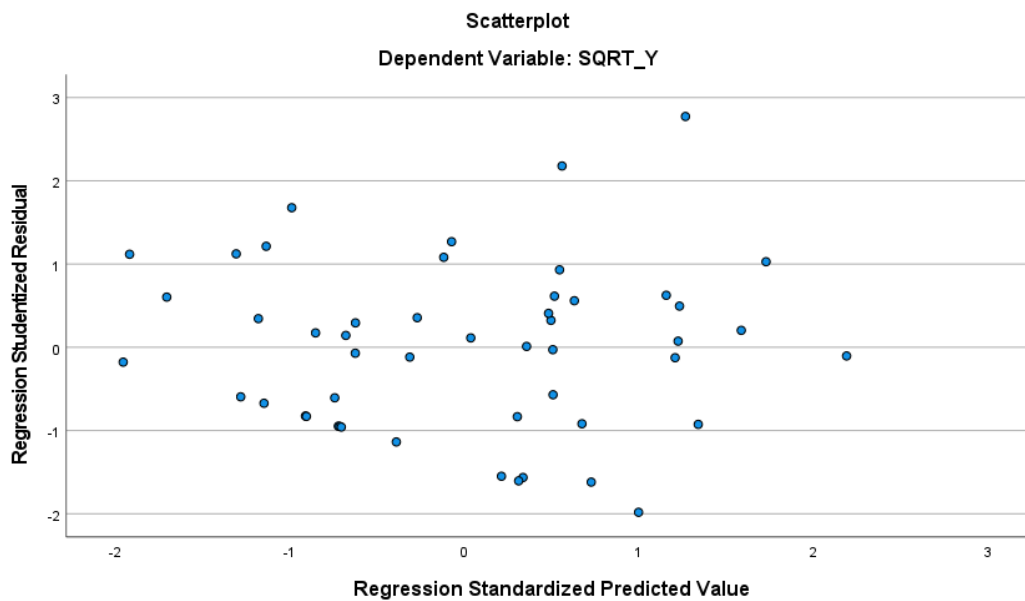
Lampiran 6 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	613.469	939.748		.653	.517
	SQRT_X1	-.006	.134	-.009	-.042	.967
	SQRT_X2	.088	.137	.108	.641	.525
	SQRT_X3	-.003	.075	-.008	-.037	.971

a. Dependent Variable: ABRESID



Lampiran 7 Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-301.848	1539.484		-.196	.845
	SQRT_X1	.600	.220	.509	2.732	.009
	SQRT_X2	.427	.224	.275	1.905	.063
	SQRT_X3	-.168	.123	-.253	-1.360	.181

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Lampiran 8 Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-301.848	1539.484		-.196	.845
	SQRT_X1	.600	.220	.509	2.732	.009
	SQRT_X2	.427	.224	.275	1.905	.063
	SQRT_X3	-.168	.123	-.253	-1.360	.181

a. Dependent Variable: SQRT_Y

Lampiran 9 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.527 ^a	.277	.230	1327.79701	1.377

a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1

b. Dependent Variable: SQRT_Y